

HUKUM KEUANGAN NEGARA

TEORI DAN PRAKTIK

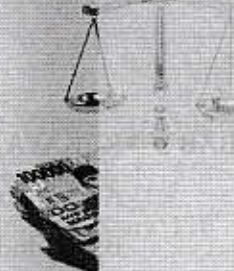
EDISI KETIGA

Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.
Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.

		PETUSTAKAAN	
No. INV	DSS / mntk / 19 / C-1		
Th. Angg.	2019	Cat C-1	
PARAF		TGL. 16/07/2019	



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Hukum Keuangan Negara	1
B. Landasan Hukum Keuangan Negara	3
C. Kedudukan Hukum Keuangan Negara	6
BAB 2 KEUANGAN NEGARA	9
A. Pengertian	9
B. Ruang Lingkup Keuangan Negara	13
C. Sumber Keuangan Negara	15
D. Pengelolaan Keuangan Negara	17
E. Pengelola Keuangan Negara	35

BAB 3	KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN	47
	A. Istilah	47
	B. Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	48
	C. Pertanggungjawaban Kekayaan Negara yang Dipisahkan	52
BAB 4	BADAN PENERIMAAN NEGARA	55
	A. Pendahuluan	55
	B. Restrukturisasi Kementerian Keuangan	57
	C. Pembentukan Badan Penerimaan Negara	60
	D. Wewenang Badan Penerimaan Negara	61
	E. Pertanggungjawaban Badan Penerimaan Negara	64
BAB 5	ANGGARAN NEGARA	67
	A. Substansi Anggaran Negara	67
	B. Fungsi Anggaran Negara	68
	C. Sifat Hukum Anggaran Negara	70
	D. Perubahan Anggaran Negara	75
	E. Pergeseran Anggaran Negara	76
BAB 6	PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA	79
	A. Ruang Lingkup Pengawasan	79
	B. Pengawasan Melekat	80
	C. Pengawasan Internal	86
	D. Pengawasan Eksternal	87
BAB 7	PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	93
	A. Pendahuluan	93
	B. Sumber Hukum	94
	C. Pemeriksa Keuangan Negara	95

D. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara	105
E. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara	113
F. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara	116
BAB 8 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	121
A. Pengertian	121
B. Timbulnya Kerugian Keuangan Negara	123
C. Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara	132
D. Kerugian Keuangan Negara Unsur Delik Korupsi	137
BAB 9 PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LUAR PERADILAN	143
A. Pendahuluan	143
B. Dasar Hukum	144
C. Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Pejabat Negara	151
D. Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Bendahara	153
E. Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara	161
F. Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Pejabat Lain	165
G. Pembebasan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara	168
BAB 10 PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERADILAN	171
A. Pendahuluan	171
B. Instrumen Hukum Keuangan Negara	172
C. Instrumen Hukum Perdata	178
D. Instrumen Hukum Pidana	180

BAB 11 BADAN LAYANAN UMUM	185
A. Pendahuluan	185
B. Pembentukan Badan Layanan Umum	186
C. Standar dan Tarif Layanan	191
D. Pengelolaan Keuangan	193
E. Tata Kelola	206
F. Remunerasi	209
BAB 12 DELIK KEUANGAN NEGARA	211
A. Pendahuluan	211
B. Setiap Orang	213
C. Setiap Pemeriksa	220
DAFTAR PUSTAKA	225
LAMPIRAN	229
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	230
TENTANG PENULIS	259